



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



LAPORAN TRIWULAN II



Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Kinerja Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan triwulan ini berfungsi sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja sekaligus sebagai alat pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan pada periode triwulan berjalan. Penyusunan laporan mengacu pada struktur yang telah ditetapkan, meliputi: pendahuluan, capaian kinerja triwulan, identifikasi permasalahan/potensi peningkatan capaian, serta rencana tindak lanjut untuk periode berikutnya.

Melalui laporan ini, kami menyajikan perkembangan pelaksanaan kegiatan beserta capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun. Evaluasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai progres kinerja sekaligus menjadi dasar pengambilan keputusan strategis dalam rangka mewujudkan **Program 3 Juta Rumah**, sebagaimana menjadi amanat Asta Cita Presiden Republik Indonesia.

Kami berharap laporan triwulan ini dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dalam meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan kinerja. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui penyediaan data, koordinasi, maupun proses verifikasi.

Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi rujukan dalam upaya peningkatan kualitas kinerja di periode berikutnya.

Jakarta, 1 Juli 2025

 Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan,



Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	4
BAB 1 PENDAHULUAN.....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Tugas dan Fungsi.....	6
1.3 Struktur Organisasi.....	7
BAB 2 CAPAIAN KINERJA.....	16
2.1 Capaian Program Triwulan I.....	16
2.1.1 Realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II.....	16
2.1.2. Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	17
2.2 Capaian Kegiatan Triwulan II.....	24
2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.....	24
2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	24
2.2.2 Capaian Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan..	30
2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan II.....	30
2.2.2.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	33
2.2.2.3 Realisasi Anggaran Triwulan II.....	36
2.2.3 Capaian Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan	
Perdesaan.....	37
2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan II.....	37
2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	39
2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan II.....	42
2.2.4. Capaian Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.....	43
2.2.4.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan II.....	43
2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	45
2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan II.....	48
2.2.5 Capaian Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.....	49
2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan II.....	49
2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	51
2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan II.....	54
2.2.6 Capaian Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.....	55
2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Triwulan II.....	55
2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II.....	57
2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan II.....	60
2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan II.....	61
BAB 3 PENUTUP.....	63
3.1 Rencana Tindak Lanjut.....	63
3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya.....	63



BAB I

PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang Triwulan II Tahun 2025, dan dalam rangka melaksanakan visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” selaras dengan Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia Periode 2024 – 2029. Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2025 ini juga disusun sebagai alat pengendali kinerja berdasarkan masukan baik dari pihak internal ataupun eksternal Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Triwulan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, serta Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Tugas dan Fungsi

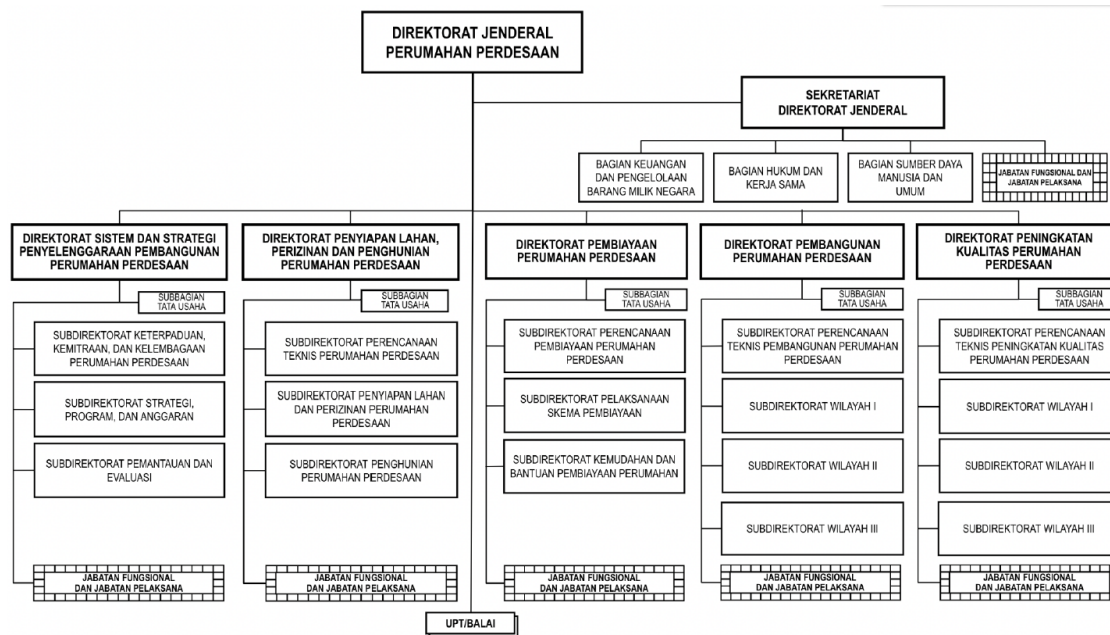
Sebagai salah satu Unit Organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perdesaan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema

- pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan dan penyiapan penghunian, penyusunan skema pembiayaan, pembangunan perumahan dan peningkatan kualitas perumahan di perdesaan;
 - f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.3 Struktur Organisasi

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PKP adalah sebagai berikut.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan
Perdesaan

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan terdiri atas:

- Sekretariat Direktorat Jenderal;
- Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan;
- Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan; dan
- Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan di atas dapat jelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

1.3.1 Sekretariat Direktorat Jenderal

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
- b. pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
- c. pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik Direktorat Jenderal;
- e. pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal.

1.3.2 Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perdesaan jangka panjang dan jangka menengah;
- b. penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- h. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.3 Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, koordinasi dan pelaksanaan penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, dan koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program, anggaran, dan penyusunan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. pelaksanaan pembinaan dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- g. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.4 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- b. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perdesaan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perdesaan;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- f. penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
- g. pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- h. pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perdesaan;
- i. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.5 Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta

prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- b. penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- c. penyusunan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- f. pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- g. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan;
- h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta

- prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perdesaan; dan
- i. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

1.3.6 Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan rumah swadaya, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan.

Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, standar pedoman peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- b. fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- c. fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang penyelenggaraan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- d. penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan; dan
- f. pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.



BAB II

CAPAIAN

KINERJA

BAB 2 CAPAIAN KINERJA

2.1 Capaian Program Triwulan I

2.1.1 Realisasi Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II
Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.1 Capaian Program Triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Tahun 2025

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian Triwulan II
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				
Sasaran Program : Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Sasaran Program:				
1.	Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan	50%	40%	80%
2.	Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah Perdesaan	0%	0%	0%
3.	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan	45%	45%	100%

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **40%** dari indikator persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perdesaan dengan realisasi sebagai berikut:

- Kegiatan program BSPS sebesar 5% meliputi penyusunan draft SE pelaksanaan BSPS dan pengusulan target alokasi khusus penerima BSPS.
- Kegiatan program Rusun sebesar 5% meliputi sinkronisasi dan koordinasi awal kegiatan pembangunan PSU, pekerjaan fisik

- mencapai 65%, pengusulan rekomposisi anggaran, koordinasi pembangunan rumah susun dengan Biro Perencanaan Kemensos RI.
- c. Kegiatan program Rusus sebesar 5% meliputi permohonan review Itjen dan TKPR untuk review pembayaran dan progres fisik mencapai 95 %.
 - d. Kegiatan program FLPP sebesar 2,5% yaitu monitoring penyaluran bantuan FLPP pada delineasi perdesaan.
 - e. Koordinasi dengan BPS terkait permohonan dukungan DTSEN dan penyusunan SK Satgas Penyediaan data perumahan di Kementerian PKP.

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perdesaan dengan sub indikator persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh untuk wilayah Perdesaan.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perdesaan dengan capaian sebesar **45%**, capaian ini berasal dari **sub indikator pertama** terkait persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dengan realisasi kegiatannya yaitu monitoring dan evaluasi Intervensi Direktorat Jenderal Perdesaan terhadap rumah tidak layak huni.

2.1.2. Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.1.2 Capaian triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II(%)
Kegiatan 1:				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
Indikator Kinerja Sasaran Strategi : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan		42.57%	42.57%	100%
1.	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	36.6%	36.6%	100%
1.1.	Sub-indikator Pengelolaan Arsip Dinamis	18.28%	18.28%	100%
1.2.	Sub-indikator Sumber Daya Kearsipan	18.28%	18.28%	100%
2.	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	35.0%	35.0%	100%
2.1.	Sub-indikator Tingkat ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	10.51%	10.51%	100%
2.2.	Sub-indikator Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	10.51%	10.51%	100%
2.3.	Sub-indikator Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	14.01%	14.01%	100%
3.	Tingkat layanan pembentukan produk hukum	40.2%	40.2%	100%
3.1.	Sub-indikator Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	10.05%	10.05%	100%
3.2.	Sub-indikator Tingkat efektivitas penyusunan perjanjian	10.05%	10.05%	100%
3.3.	Sub-indikator tingkat efektifitas penyusunan pertimbangan hukum	10.05%	10.05%	100%
3.4.	Sub-indikator tingkat efektifitas advokasi hukum	10.05%	10.05%	100%
4.	Tingkat layanan pembinaan dan	35.0%	35.0%	100%

pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana			
5. Nilai Kinerja Anggaran	44.1%	44.1%	100%
5.1. Sub-indikator Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA	26.46%	26.46%	100%
5.2. Sub-indikator Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi	8.82%	8.82%	100%
5.3. Sub-indikator Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi	8.82%	8.82%	100%
6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	50.0%	50.0%	100%
7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	46.1%	46.1%	100%
7.1. Sub-indikator Jumlah Laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan	11.06%	11.06%	100%
7.2. Sub-indikator Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi	0.00%	0.00%	0%
8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	42.8%	42.8%	100%
8.1. Sub-indikator Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan	21.38%	21.38%	100%
8.2. Sub-indikator Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik	21.38%	21.38%	100%
9. Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	50.0%	50.0%	100%
10. Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP	46.0%	46.0%	100%
10.1. Sub-indikator Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu	4.60%	4.60%	100%
10.2. Sub-indikator Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi	18.4%	18.4%	100%

10.3 Sub-indikator Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi	0.00%	0.00%	0%
---	-------	-------	----

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **36.6%** (akumulasi dari capaian realisasi TW 1 dan TW 2) dari indikator kinerja Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan dengan persentase sub indikator dan realisasi sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Pengelolaan Arsip Dinamis, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **18,28%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip, dan Pemeliharaan Arsip.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Sumber Daya Kearsipan, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **18,28%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II yaitu:
 - i. Penyusunan kebutuhan SDM Kearsipan pada Ditjen Perumahan perdesaan
 - ii. Penggunaan Prasarana dan Sarana Kearsipan dengan menggunakan google drive dan onedrive Kementerian PKP"

Indikator kinerja kedua adalah Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **35.0%** dengan realisasi kegiatan yaitu:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10,51%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksannanya pendataan BMN tepat waktu.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtangan dan penghapusan BMN, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10,51%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah Koordinasi

pemindahtanganan BMN dari Ex Direktorat Rumah Swadaya Kementerian PUPR ke Kementerian PKP dan terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN .

- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **14,01%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya penetapan status penggunaan BMN.

Indikator kinerja ketiga adalah Tingkat layanan pembentukan produk hukum, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **40.2%** dengan realisasi kegiatan sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10.05%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah tersusunnya 7 produk hukum berbentuk Keputusan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan..
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat efektivitas penyusunan perjanjian, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10.05%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah tersusunnya 1 nota kesepahaman, 1 Draft Perjanjian Kerjasama dan 1 Draft Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perumdesa dengan Kemendagri, BPS, UI dan KP2MI.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu tingkat efektivitas penyusunan pertimbangan hukum, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10.05%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan II adalah tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 11 usulan pertimbangan hukum.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat efektifitas advokasi hukum, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **10.05%**. Realisasi terhadap sub indikator keempat yang dilakukan pada triwulan II adalah tidak ada perkara yang terselesaikan karena tidak ada perkara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja keempat adalah Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **35.0%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah melakukan penyusunan Laporan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian.

Indikator kinerja kelima adalah Nilai Kinerja Anggaran, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **44.1%** dengan realisasi kegiatan yaitu:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **26.46%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terealisasinya nilai IKPA Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada aplikasi Monev PA.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **8.82%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah tidak ada nilai pagu minus di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **8.82%**. Realisasi terhadap sub indikator ketiga yang dilakukan pada triwulan II adalah penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja keenam adalah Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **50.0%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah tidak ada rekomendasi temuan LHP BPK RI di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dikarenakan kementerian baru berdiri pada Oktober 2024..

Indikator kinerja ketujuh adalah Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **46.1%** dengan realisasi kinerja yaitu terkumpulnya LKJ dari unit kerja.

Indikator kinerja kedelapan adalah Tingkat Layanan Komunikasi Publik, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **42.8%** dengan realisasi kegiatan yaitu:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **21.38%**. Realisasi terhadap sub indikator pertama yang dilakukan pada triwulan II adalah terlaksananya *launching* sosial media Ditjen perumahan perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **21.38%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II adalah penyusunan sistem aplikasi SPAN Lapor.

Indikator kinerja kesembilan adalah Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **50.0%**. Realisasi yang dilakukan terhadap indikator kinerja tersebut adalah penyusunan konsep video konten media sosial.

Indikator kinerja kesepuluh adalah Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP, dengan capaian kinerja pada triwulan II sebesar **46.0%** dengan realisasi kegiatan yaitu persiapan Penilaian Mandiri SPIP meliputi pengumpulan bukti dukung Januari-Juni 2025 dan terlaksananya Penilaian Mandiri SPIP.

2.2 Capaian Kegiatan Triwulan II

2.2.1 Capaian Kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

2.2.1.1 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.1 Capaian Triwulan II Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan	44%	44%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	37,09%	37,09%	100%
i.	Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	11,12%	11,12%	100%
ii.	Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	11,12%	11,12%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	14,84%	14,84%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian	50%	50%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja	43,5%	43,5%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	50%	50%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	36,88%	36,88%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
i.	Jumlah laporan AKIP	36,88%	36,88%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	-	-	-
1.6	Sub-indikator 6 : "Tingkat Layanan Komunikasi Publik"	42,75%	42,75%	100%
i.	Sentimen pemberitaan positif dan netral di media	18,44%	18,44%	100%
ii.	pelayanan publik yang ditindaklanjuti	18,44%	18,44%	100%
1.7	Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	36,55%	36,55%	100%
i.	Pengelolaan arsip dinamis	18,28%	18,28%	100%
ii.	Sumber Daya Kearsipan	18,28%	18,28%	100%
1.8	Sub-indikator 8 : Tingkat Layanan Pembentukan Produk Hukum	40,3%	40,3%	100%
i.	Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum	20,1%	20,1%	100%
ii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian	20,1%	20,1%	100%
iii.	Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum	18,4%	18,4%	100%
iv.	Tingkat efektivitas advokasi hukum	18,4%	18,4%	100%
1.9	Sub-indikator 9 : Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	9,2%	9,2%	100%
i.	Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan	-	-	-
ii.	Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal perumahan perdesaan	-	-	-
iii.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Direktorat Jenderal Perumahan perdesaan			
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **44%** (akumulasi dari capaian realisasi TW 1 dan TW 2) dari indikator tingkat dukungan manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal

Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu Tingkat efektivitas pengelolaan BMN, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **37.09%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaiannya sebesar **11,12%** dengan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pendataan BMN tepat waktu di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **11,12%** dengan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **14,84%** dengan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Tingkat Layanan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **50%**. Realisasi terhadap sub indikator kedua yang dilakukan pada triwulan II yaitu:
 - i. Terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - ii. Terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Nilai Kinerja Anggaran Unit Kerja, yang pada triwulan II tahun 2025 memiliki capaian **43,5%** dan persentase sub indikator serta realisasi sebagai berikut:

- i. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA, dengan persentase capaian sebesar **26,1%** dan realisasi kinerja yaitu terealisasinya nilai IKPA Dirjen Perumahan Perdesaan Monev PA.
- ii. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi, dengan persentase capaian sebesar **8,7%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada nilai pagu minus di Ditjen Perumahan perdesaan.
- iii. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi, dengan persentase capaian sebesar **8,7%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya penyusunan kegiatan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat tindak lanjut rekomendasi atas temuan LHP BPK RI sebesar **50%** (akumulasi dari capaian realisasi TW 1 dan TW 2) dengan realisasi kinerja yaitu, tidak ada rekomendasi temuan LHP BPK RI di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dikarenakan kementerian baru berdiri pada Oktober 2024.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **36,88%**, dengan realisasi kegiatannya yaitu Tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan II di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- f. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat layanan komunikasi publik sebesar **42,75%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Sentimen pemberitaan positif dan netral di media dengan persentase capaian sebesar **18,44%** dan realisasi kinerja yaitu telah dilaksanakannya pembuatan sosial media Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Pengelolaan Website Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan di MyPKP.
 - ii. Pelayanan publik yang ditindaklanjuti dengan persentase capaian sebesar **18,44%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan konsep aplikasi SPAM Lapor.
- g. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas pengelolaan kearsipan sebesar **36,55%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :

- i. Pengelolaan arsip dinamis dengan persentase capaian sebesar **18,28%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya Layanan Pengelolaan Arsip melalui Pengendalian Naskah Dinas, Penggunaan Arsip dan Pemeliharaan Arsip di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
 - ii. Sumber Daya Kearsipan dengan persentase capaian sebesar **18,28%** dan realisasi kinerja yaitu terlaksananya proses penyusunan kebutuhan SDM Kearsipan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dan Penggunaan Prasarana dan Sarana Kearsipan dengan menggunakan google drive dan onedrive Kementerian PKP di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- h. **Sub indikator kedelapan**, yaitu tingkat layanan pembentukan produk hukum sebesar **40,3%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum dengan persentase capaian sebesar **20,1%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya 7 produk hukum berbentuk Keputusan Dirjen perumahan Perdesaan.
 - ii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian dengan persentase capaian sebesar **20,1%** dan realisasi kinerja yaitu Tersusunnya 1 nota kesepahaman, 1 Draft Perjanjian Kerjasama dan 1 Draft Nota Kesepahaman antara Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan dengan Kementerian Dalam Negeri, BPS, UI dan KP2MI.
 - iii. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum dengan persentase capaian **10,06%** dan realisasi kinerja yaitu tersusunnya usulan Pertimbangan Hukum Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan sebanyak 11 usulan pertimbangan hukum.
 - iv. Tingkat efektivitas advokasi hukum dengan persentase capaian **10,06%** dan realisasi kinerja yaitu tidak ada perkara yang terselesaikan karena tidak ada Perkara yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

- i. **Sub indikator kesembilan**, yaitu tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP sebesar **18,4%** dari penilaian penyusunan laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan. Adapun realisasi kinerjanya yaitu Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri SPIP Triwulan II di Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

2.2.1.2 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Anggaran Triwulan II Sekretariat Direktorat Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Efektif	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		8,890,499	1,923,323	17.20%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	6,941,165	1,521,928	16.48%
EBA.994	Layanan Perkantoran	5.153.165	1,277,117	24,78%
EBA.956	Layanan BMN	60,000	0	0%
EBA.957	Layanan Hukum	200,000	7,718	3.83%
EBA.963	Layanan Data dan Informasi	300,000	2,185	0.75%
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	50,000	0	0%
EBA.952	Layanan Umum	1.178.000	234,907	19,94%
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	559,334	257,081	45.96%
EBB.951	Layanan Sarana Internal	559,334	257,081	45.96%
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	845,000	7,449	0.88%
EBC.964	Layanan Manajemen SDM	845,000	7,449	0.88%
EBC.996	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	-		
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	545,000	136,864	25.11%
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	50,000	0	0%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Efektif	Realisasi	%
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	-		
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	317,500	136,864	49.37%
EBD.961	Layanan Reformasi Kinerja	127,500	0	0%
EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	50,000	0	0%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **17.20%**.

2.2.2 Capaian Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.2.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.1 Capaian Triwulan II Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 1 : Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan	45.00%	45.00%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
1.1	Merupakan Penggabungan dari 2 Sub-Indikator dengan pembobotan masing-masing: 1.1.1. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	17,5%	17,5%	100%
	1.1.2. Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan	7,5%	7,5%	100%
1.2.	Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	5%	5%	100%
1.3.	Sub-indikator perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan	20%	20%	100%
2.	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan	45%	45%	100%
3.	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan	45%	45%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **45.00%** (merupakan akumulasi dari capaian kinerja TW 1 dan TW 2) dari indikator tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan dan strategi, pemrograman, anggaran serta

kemitraan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar **17,5%** dengan realisasi kinerja yaitu :

- i. Tersusunnya Konsep Metode Perhitungan, Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 - ii. Workshop Penyusunan Kebijakan dan Strategi serta Pengembangan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan
 - iii. Penyusunan perjanjian Kerja Sama dengan yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia
 - iv. Penyusunan draft MOU dengan KP2MI
 - v. Terlaksananya Kegiatan Desk Verifikasi Usulan Pagu Indikatif TA 2026 Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
 - vi. Kegiatan Konsolidasi Proses Revisi Buka Blokir, Realokasi, dan Distribusi BSPS TA 2025
 - vii. Tersusunnya Struktur Kinerja atau Satuan Tiga Pagu Indikatif Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2026
 - viii. Terlaksananya Revisi Anggaran ke-2, 3, 4, dan 5 Ditjen Perumahan Perdesaan TA 2025
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu perbandingan realisasi jumlah Pemda yang terbina tentang Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR terhadap jumlah Pemda di wilayah perdesaan sebesar 7,5% dengan realisasi kinerja yaitu sosialisasi terkait Pembebasan BPHTB, Percepatan PBG, dan PPN bagi MBR.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar 5% dengan realisasi kinerja yaitu penyusunan dokumen perbandingan realisasi data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu perbandingan realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perdesaan terhadap target tahunan sebesar 20% dengan realisasi kinerja yaitu tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan Triwulan II.

Indikator kinerja kedua adalah persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **45%** dan realisasi kinerja pada Triwulan II yaitu, terlaksananya koordinasi dengan pemerintah daerah terkait fasilitasi rumah tangga yang melakukan pembangunan baru atau renovasi rumah tidak layak huni di wilayah perdesaan berbasis anggaran non PKP.

Kemudian pada **indikator kinerja ketiga** yaitu persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perdesaan dengan persentase sebesar **45%** dan realisasi kinerja yang dilaksanakan yaitu, koordinasi dengan Bappenas terkait data baseline desa yang memiliki 100% rumah layak huni dalam RPJMN 2025 - 2029 melalui Workshop Penyusunan Kebijakan dan Strategi serta Pengembangan Kemitraan Perumahan Perdesaan, identifikasi data baseline desa yang memiliki 100% rumah layak huni dalam RPJMN 2025 - 2029, dan Koordinasi dengan Kementerian Desa terkait data baseline desa yang memiliki 100% rumah layak huni dalam RPJMN 2025 - 2029 melalui Workshop Penyusunan Kebijakan dan Strategi serta Pengembangan Kemitraan Perumahan Perdesaan.

2.2.2.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.2 Capaian Triwulan II Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Kegiatan 2 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW I (%)
Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Tingkat Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan perdesaan		42%	42%	100%
1.1 Sub-indikator 1 : Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		37,08%	37,08%	100%
i. "Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN		11,12%	11,12%	100%
ii. " Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN		11,12%	11,12%	100%
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		14,82%	14,82%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat Layangan Pembinaan dan Pengelolaan Kepegawaian		50%	50%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai Kinerja anggaran unit kerja		43,5%	43,5%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Layanan Manajemen Data unit organisasi		50%	50%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		46,1%	46,1%	100%
i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja		36,88%	36,88%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		9,22%	9,22%	100%
1.6 Sub-indikator 6 : Tingkat efektifitas penerapan Manajemen Risiko		36,4%	36,4%	100%
i. "Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan		36,4%	36,4%	100%
ii. Nilai efektivitas MR		-	-	-
1.7 Sub-indikator 7 : Tingkat Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran		37,5%	37,5%	100%
Pelaksana: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **42%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **37,08%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaiannya sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaiannya sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentasenya capaiannya sebesar **14,82%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksanannya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **43,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat layanan manajemen data unit organisasi sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen data dan Informasi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu Tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **46,1%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **36,88%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan 2 di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaian sebesar **9,22%** dengan realisasi kinerja yaitu tercapainya nilai evaluasi AKIP di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- f. **Sub indikator keenam**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **36,4%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- g. **Sub indikator ketujuh**, yaitu tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran sebesar **37,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tersusunnya dokumen pelaksanaan anggaran triwulan 2 di Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan.

2.2.2.3 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.3 Capaian Anggaran Triwulan II Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		458.232	76,040	16,59%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	458.232	76,040	16,59%
EBA.994	Layanan Perkantoran	353.078	25,935	2.06%
EBA.962	Layanan Umum	105.154	50,105	47,64%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.215.509	851,526	20,20%
ABF.001	Kebijakan, Kemitraan dan Kelembagaan Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.676.841	80,946	4,83%
AEA.001	Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	776.841	89,511	11,52%
BMA.001	Data dan Infromasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	330.000	3,325	1,01%
FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1.431.827	677,744	47,33%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **16,59%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **20,20%**.

2.2.3 Capaian Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

2.2.3.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada perjenjangan kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025-2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.1 Capaian Triwulan II Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan		31%	31%	100%
Sub Indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan, Perencanaan Teknis dan Dukungan Teknis Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		7%	7%	100%
Sub Indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		8%	8%	100%
Sub Indikator 3 : Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan per tahun		16%	16%	100%

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu **31%** dari indikator tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen kebijakan, perencanaan teknis dan dukungan teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **7%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Penyusunan NSPK Bidang Penyiapan Lahan di Lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman,
 - ii. Rapat Penyusunan Program dan Anggaran, koordinasi terkait sistem bantuan perumahan dan kawasan permukiman bersama dengan NGO (Habitat for humanity),
 - iii. Sosialisasi Penyiapan Lahan Perumahan Perdesaan kepada Balai P3KP dan Pemerintah Daerah.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu perbandingan realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyiapan lahan, perizinan dan penghunian

perumahan perdesaan per tahun sebesar **8%** dengan realisasi kinerja yaitu:

- i. Penyusunan Pengelolaan Data dan Informasi Potensi Lahan di Kawasan Perdesaan,
- ii. Inventarisasi data lahan Badan Bank Tanah, Rampasan, Usulan Pemda, Aset BI, Tanah Terlantar.

c. **Sub indikator ketiga**, yaitu perbandingan realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perdesaan per tahun sebesar **16%** dengan realisasi kinerja yaitu:

- i. Monitoring dan Evaluasi Program Pembangunan Rumah Susun dan Survei Pembangunan 2.000 Rumah Sehat Papua,
- ii. Survey Verifikasi Lahan di Kabupaten Sumedang, Subang, Jember, Kendal, Brebes Kuantan Sengigi, Simalungun, Tulang Bawang,
- iii. Koordinasi Percepatan Program 3 Juta Rumah di Provinsi Lampung dan Bengkulu.

2.2.3.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.2.2 Capaian Triwulan II Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian	42,6%	42,6%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Perumahan Perdesaan				
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	37,08%	37,08%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	11,12%	11,12%	100%
ii.	"Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	11,12%	11,12%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	14,82%	14,82%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	50%	50%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	43,5%	43,5%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	46,1%	46,1%	100%
i.	"Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja	36,88%	36,88%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	9,22%	9,22%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	36,4%	36,4%	100%
i.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan	36,4%	36,4%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **42,6%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **37,08%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
- Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
 - Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **14,82%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **43,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **46,1%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
- Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **36,88%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan

laporan AKIP triwulan II di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

- ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu tercapainya nilai evaluasi AKIP di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **36,4%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan.

2.2.3.3 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.3.3 Capaian Anggaran Triwulan II Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		448,543	27.180	6,06%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	448,543	27,180	6,06%
EBA.994	Layanan Perkantoran	346,017	26,938	7,79%
EBA.962	Layanan Umum	102,526	242	0,24%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.113.525	124.787	3,03%
ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	400.000	1.941	0,49%
BMA.002	Data dan Infromasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	200.000	0.000	0,00%
CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan	1.150.000	1.890	0,16%

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
	Dukungan Manajemen	448,543	27.180	6,06%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	448,543	27,180	6,06%
EBA.994	Layanan Perkantoran	346,017	26,938	7,79%
EBA.962	Layanan Umum	102,526	242	0,24%
	Perdesaan			
CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perdesaan	1.000.000	94.601	9,46%
FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	1.063.525	28.022	2,63%
FBA.001	Pembinaan Pemerintah Daerah Kebijakan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perdesaan	300.000	200	0,07%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi sebesar **6,06%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **3,03%**.

2.2.4. Capaian Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

2.2.44.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada penjenjangan kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.1 Capaian Triwulan II Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 3 : Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya akses rumah tangga yang				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
terfasilitasi pembiayaan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan		38%	38%	100%
Sub-indikator 1 : Jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan		8%	8%	100%
Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan		5%	5%	100%
Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan		5%	5%	100%
Sub-indikator 4 : Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Penyaluran Bantuan Subsidi/Kemudahan Pembiayaan		10%	10%	100%

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu **38%** dari indikator tingkat kinerja persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau di wilayah perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Kebijakan Bantuan Pembiayaan dan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan sebesar **8%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Penjaringan Masukan terhadap Penyusunan NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan
 - ii. Penjaringan Masukan Dukung Program, Anggaran, serta Perumusan Kebijakan dan Strategi Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan
 - iii. Penjaringan Masukan Kebijakan Skema Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan
 - iv. Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan sebesar **5%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Penyusunan regulasi menyesuaikan masukan yang diberikan pada rapat penjaringan masukan

- ii. Identifikasi risiko pelaksanaan kpbu menggunakan regulasi yang telah disesuaikan
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perdesaan sebesar **5%** dengan realisasi kinerja yaitu penyusunan konsep Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu Jumlah fasilitasi dan koordinasi penyaluran bantuan subsidi/kemudahan pembiayaan sebesar **10%** dengan melaksanakan pendataan dan monitoring terkait fasilitasi bantuan pembiayaan perumahan di lingkungan Ditjen Perdesaan.

2.2.4.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.2 Capaian Triwulan II Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan	44,4%	44,4%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	37,08%	37,08%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	11,12%	11,12%	100%
ii.	"Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	11,12%	11,12%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN		14,82%	14,82%	100%
1.2 Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		50%	50%	100%
1.3 Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		43,5%	43,5%	100%
1.4 Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		46,1%	46,1%	100%
i. "Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja		36,88%	36,88%	100%
ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja		9,22%	9,22%	100%
1.5 Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko		36,4%	36,4%	100%
i. Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan		36,4%	36,4%	100%
ii. Nilai efektivitas MR		-	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **44,4%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **37,08%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

- ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **14,82%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksananya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksananya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksananya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **43,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **46,1%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **36,88%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan II di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu tercapainya nilai evaluasi AKIP di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **36,4%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan.

2.2.4.3 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.4.3 Capaian Anggaran Triwulan II Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		438.852	99,868	22,76
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	438,852	99,868	22,76%
EBA.994	Layanan Perkantoran	338,955	33,467	9,87%
EBA.962	Layanan Umum	99,897	66,401	66,47%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		3.897.023	86,364	2,22
ABF.003	Kebijakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1.350.000	24,929	1,85
AFA.001	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perdesaan	300.000	26,012	8,67
AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perdesaan yang Siap Dikerjasamakan	550.000	5,421	0,99
FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	600.000	95	0,02
QAH.001	Fasilitasi Penyaluran Bantuan Pembiayaan Perumahan Perdesaan	1.097.023	5,073	0,46
QFC.001	Subsidi Pembiayaan Perumahan Perdesaan	-		

Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3*

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Direktorat Pembiayaan Perumahan Perdesaan pada program dukungan manajemen telah terealisasi **22,76%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **2,22%.**

2.2.5 Capaian Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

2.2.5.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada penjenjangan kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut

Tabel 2.2.5.1 Capaian Triwulan II Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 4 : Penyediaan rumah yang layak huni di wilayah perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya ketersediaan rumah baru layak huni di perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan		50%	61,09%	122,18%
1a. Sub-indikator 1 : Jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan		20%	46,09%	230,45%
1b. Sub-indikator 2 : Jumlah Kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan		10%	10%	100,00%
1c. Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan		20%	20%	100,00%
2. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan		50%	193,58%	387,16%
3. Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan		50%	138,00%	276,00%
4. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan		0%	-	-
5. Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan		0%	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu

61,09% dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah laporan pemrograman dan penganggaran pembangunan perumahan perdesaan sebesar **46,09%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Pembahasan Teknis Pengadaan Penyediaan Rumah Bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
 - ii. Pembahasan Katalog Desain Perumahan Perdesaan.
 - iii. Pembahasan Konsep Katalog Desain Perumahan Perdesaan .
 - iv. Pembahasan Konsep Katalog Desain Perumahan Perdesaan di Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo.
 - v. Pembahasan Katalog Desain Perumahan Perdesaan di Provinsi Jawa Barat.
 - vi. Pembahasan Konsep Katalog Desain Perumahan Perdesaan Di Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **10%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan Kemendagri.
 - ii. Sinkronisasi dan Koordinasi Awal Kegiatan Pembangunan PSU.
 - iii. Koordinasi Bidang Pembangunan Perumahan Perdesaan Di Provinsi Sulawesi Selatan
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **20%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Sosialisasi Pendataan Pembangunan Perumahan Perdesaan Kabupaten Dampingan Subdit Perencanaan Teknis Pembangunan Perumahan Perdesaan TA 2025.
 - ii. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun 2025.

Indikator kinerja kedua adalah persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **193.58%** dan realisasi kinerja pada Triwulan II yaitu, telah terlaksana pembangunan rumah khusus sebanyak 416 unit dengan progres sebesar 95,16% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan.

Indikator kinerja ketiga adalah persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perdesaan dengan realisasi capaian sebesar **138.00%** dan realisasi kinerja pada Triwulan II yaitu, telah terlaksana pembangunan rumah susun sebanyak 358 unit dengan progres sebesar 69% pada Direktorat Jenderal perumahan Perdesaan per 30 Juni 2025.

Kemudian pada **indikator kinerja keempat** adalah persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan dan **indikator kinerja kelima** persentase rumah yang mendapat bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum di wilayah perdesaan.

2.2.5.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.2 Capaian Triwulan II Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 3 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Indikator Kinerja Kegiatan				
a.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan	44,4%	44,4%	100%
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	37,08%	37,08%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	11,12%	11,12%	100%
ii.	"Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	11,12%	11,12%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	14,82%	14,82%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	25%	50%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	43,5%	43,5%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	46,1%	46,1%	100%
i.	"Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja	18,44%	36,88%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	9,22%	9,22%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	36,4%	36,4%	100%
i.	Jumlah laporan manajemen risiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen risiko yang wajib diselesaikan	36,4%	36,4%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **44,4%** dari indikator tingkat dukungan

manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **37,08%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **11,12%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **14,82%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksanannya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **43,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **46,1** dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **36,88%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan

laporan AKIP triwulan II Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

- ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu tercapainya nilai evaluasi AKIP Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **36,4%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunya laporan Manajemen Risiko Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan.

2.2.5.3 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.5.3 Capaian Anggaran Triwulan II Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		467,923	42,595	9,10%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	467,923	42,595	9,10%
EBA.994	Layanan Perkantoran	360,139	40,149	11,15%
EBA.962	Layanan Umum	107,784	2,446	2,27%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		4.763.028	330.243	6,93%
ABF.004	Kebijakan Pembangunan Perumahan Perdesaan	3.067.028	192,775	6,29%
BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	200,000	35,742	17,87%
FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Perumahan Perdesaan	1.496.000	101,726	6,80%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3.

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Direktorat Pembangunan Perumahan Perdesaan pada

program dukungan manajemen telah terealisasi **9,10%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi sebesar **6,93%**.

2.2.6 Capaian Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

2.2.6.1 Realisasi Kinerja Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Triwulan II

Capaian kinerja triwulan dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada penjenjangan kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.1..1 Capaian Triwulan II Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 5: Unit Kerja Kontributor IKP Penanganan Kumuh DJKP				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan	12,5%	-	-

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan indikator persentase luasan kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perdesaan tidak terealisasi dikarenakan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada anggaran untuk penanganan kawasan kumuh.

Tabel 2.2.6.1.2 Capaian Triwulan II Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 6 : Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan : Meningkatnya penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				

1. Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	30%	30%	100%
1a. Sub-indikator 1 : Jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	15%	15%	100%
1b. Sub-indikator 2 : Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan	5%	5%	100%
1c. Sub-indikator 3 : Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan	10%	10%	100%
2. Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan	15%	15%	100%
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan			

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu **30%** dari indikator persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu jumlah Dokumen Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan sebesar **25%** dengan realisasi kinerja yaitu :
 - i. Terlaksananya persiapan pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dengan BP3KP delineasi perdesaan;
 - ii. Pembahasan Penyusunan SE Dirjen Tata Kelola dan Pengendalian Risiko tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya;
 - iii. Terlaksananya percepatan tindak lanjut Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan sebesar **25%** dengan realisasi kinerja yaitu:

- i. Tersusunnya SK Tim Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
- ii. Terlaksananya Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Perumahan Perdesaan sebesar **25%** dengan realisasi kinerja yaitu:
 - i. Terlaksananya Rapat Koordinasi Teknis Perumahan Perdesaan
 - ii. Terlaksananya Rapat Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan II TA 2025
 - iii. Terlaksananya Kunjungan Lapangan dan mendukung pendataan perumahan perdesaan untuk terwujudnya Program Nasional Tiga Juta Rumah.

Kemudian pada **indikator kinerja kedua** yaitu persentase penyediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perdesaan dengan persentase sebesar **15%** dan realisasi kinerja yang dilaksanakan yaitu, Penjaringan Usulan BSPS Tahun Anggaran 2025.

2.2.6.2 Realisasi Kinerja Dukungan Manajemen Triwulan II

Capaian kinerja triwulan Program Dukungan Manajemen dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi dengan target perjanjian kinerja. Target kinerja triwulan II Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan diperoleh dari Rencana Strategis RPJMN 2025–2029. Adapun persentase capaian pada triwulan II Tahun 2025, diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.2 Capaian Triwulan II Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Kegiatan 6 :Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan				
Sasaran kegiatan: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
Indikator Kinerja Kegiatan				
1.	Tingkat dukungan manajemen Direktorat	44,4%	44,4%	100%

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/ Sub Indikator	Target Perjanjian Kinerja	Realisasi Capaian Kinerja	Capaian TW II (%)
Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				
1.1	Sub-indikator 1 : Tingkat efektivitas pengelolaan BMN	37,08%	37,08%	100%
i.	"Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN	11,16%	11,16%	100%
ii.	"Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN	11,16%	11,16%	100%
iii.	Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN	14,82%	14,82%	100%
1.2	Sub-indikator 2 : Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian	50%	50%	100%
1.3	Sub-indikator 3 : Nilai kinerja anggaran Unit Kerja	43,5%	43,5%	100%
1.4	Sub-indikator 4 : Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja	46,1%	46,1%	100%
i.	"Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan unit kerja	36,88%	36,88%	100%
ii.	Nilai evaluasi AKIP unit kerja	9,22%	9,22%	100%
1.5	Sub-indikator 5 : Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko	36,4%	36,4%	100%
i.	Jumlah laporan manajemen resiko yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan manajemen resiko yang wajib diselesaikan	36,4%	36,4%	100%
ii.	Nilai efektivitas MR	-	-	-
Pelaksana: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan				

*Persentase target dan realisasi merupakan akumulasi dari TW I-TW II

Berdasarkan tabel capaian kinerja di atas, capaian kinerja pada kegiatan Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan pada Triwulan II Tahun 2025 yaitu sebesar **44,4%** dari indikator tingkat dukungan manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan, dengan persentase sub indikator dan realisasinya sebagai berikut:

- a. **Sub indikator pertama**, yaitu tingkat efektivitas pengelolaan BMN sebesar **37,08%**, dengan rincian penilaian efektivitas sebagai berikut:
 - i. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN dengan persentase capaian sebesar **11,16%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pendataan BMN tepat waktu di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - ii. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN dengan persentase capaian sebesar **11,16%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya pemanfaatan serta pengelolaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
 - iii. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN dengan persentase capaian sebesar **14,82%** dan realisasi kegiatannya yaitu terlaksanannya penetapan status penggunaan BMN di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- b. **Sub indikator kedua**, yaitu tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian sebesar **50%**, dengan realisasi kinerja yaitu, terlaksanannya pembinaan pegawai melalui kegiatan diklat dan seminar serta terlaksanannya pengelolaan kepegawaian melalui kenaikan pangkat dan jabatan fungsional di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- c. **Sub indikator ketiga**, yaitu nilai kinerja anggaran unit kerja sebesar **43,5%**, dengan realisasi kinerja yaitu, tercapainya nilai kinerja anggaran unit kerja di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- d. **Sub indikator keempat**, yaitu tingkat penyelenggaraan AKIP unit kerja sebesar **46,1%**, dengan rincian penilaian sebagai berikut :
 - i. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dengan persentase capaiannya sebesar **36,88%** dan realisasi kegiatannya yaitu tersusunnya laporan rencana aksi dan laporan AKIP triwulan II di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

- ii. Nilai evaluasi AKIP unit kerja, dengan persentase capaiannya sebesar **9,22%** dan realisasi kinerja yaitu tercapainya nilai evaluasi AKIP di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.
- e. **Sub indikator kelima**, yaitu tingkat efektivitas penerapan Manajemen Risiko sebesar **36,4%**, dari penilaian jumlah laporan Manajemen Risiko yang telah diselesaikan dengan realisasi kegiatannya yaitu tersusunya laporan Manajemen Risiko di Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan.

2.2.6.3 Realisasi Anggaran Triwulan II

Capaian realisasi anggaran triwulan II dapat diperoleh dengan membandingkan antara realisasi pada triwulan tersebut dengan target yang diperoleh dari Klasifikasi Rincian Output/Rincian Output (KRO/RO) sesuai DIPA Revisi ke-3. Berikut ini adalah target persentase keuangan dan fisik pada triwulan II Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.2.6.3 Capaian Anggaran Triwulan II Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

Kode	Program/Kegiatan/KRO/RO	Realisasi Triwulan II		
		Pagu Total	Realisasi	%
Dukungan Manajemen		477,612	108,651	22,75%
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	477,612	108,651	22,75%
EBA.994	Layanan Perkantoran	367,200	82,039	22.34%
EBA.962	Layanan Umum	110,412	26,612	24.10%
Perumahan dan Kawasan Permukiman		5.196.031	177,197	3,41%
ABF.005	Kebijakan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	2.100.000	64,584	3,08%
BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.525.000	61,471	4,03%
FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan	1.571.031	51,142	3,26%

*Pagu anggaran mengacu pada DIPA revisi ke-3

Berdasarkan tabel realisasi anggaran di atas, pada triwulan II realisasi anggaran oleh Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perdesaan

pada program dukungan manajemen telah terealisasi **22,75%** dan pada program perumahan dan kawasan permukiman telah terealisasi **0,05%**.

2.3 Permasalahan/Potensi Capaian Triwulan II

Pada triwulan II tahun 2025 terjadi pergeseran anggaran RBB.006 – Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan yang pada awalnya, anggaran kegiatan tersebut dialokasikan pada balai/satker. Namun, melalui revisi ke-4 DIPA tanggal 20 Mei 2025, anggaran RBB.006 tersebut dipindahkan ke Satker Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan. Namun, pada revisi ke-5 DIPA tanggal 13 Juni 2025, alokasi anggaran tersebut kembali dipindahkan dari Satker Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan ke balai/satker. Akibat dari pergeseran anggaran yang berulang tersebut, balai/satker tidak dapat segera melakukan tahapan pelaksanaan kegiatan secara optimal. Kondisi ini pada akhirnya mengakibatkan keterlambatan pelaksanaan kegiatan RBB.006 – Rumah Swadaya Perumahan Perdesaan pada triwulan II Tahun 2025 serta berpotensi mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi anggaran.

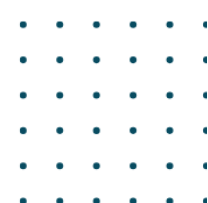
Pada triwulan II, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi kendala berupa belum selesainya proses penyusunan pembagian anggaran antara satker pusat, balai, dan satker. Akibatnya, tahapan kegiatan seperti perencanaan teknis, penyiapan administrasi, dan pelaksanaan kegiatan di lapangan belum dapat dilaksanakan secara optimal.

Namun demikian, kondisi ini sekaligus menjadi potensi capaian untuk triwulan berikutnya, seiring dengan proses pembentukan dan penyempurnaan regulasi, struktur organisasi, serta mekanisme kerja yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan secara bertahap.



BAB III

PENUTUP



BAB 3 PENUTUP

3.1 Rencana Tindak Lanjut

Sebagai upaya untuk meningkatkan capaian kinerja pada triwulan berikutnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan akan melaksanakan rencana tindak lanjut yang disusun berdasarkan hasil evaluasi atas permasalahan dan potensi capaian pada Triwulan II Tahun 2025. Rencana tindak lanjut ini diarahkan untuk memperkuat aspek perencanaan, penganggaran, serta kesiapan regulasi agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan lebih optimal.

3.2 Bukti Tindak Lanjut Permasalahan Triwulan Sebelumnya

Sebagai tindak lanjut atas permasalahan pada triwulan sebelumnya, khususnya pada pelaksanaan kegiatan di Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, telah dilakukan langkah-langkah koordinatif dan substantif untuk menyelesaikan kendala-kendala yang terjadi. Upaya tersebut meliputi penguatan sinkronisasi dengan unit terkait di lingkungan kementerian, penelaahan terhadap regulasi yang lebih tinggi sebagai rujukan, serta penyusunan draft awal dasar hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan program perumahan perdesaan. Tindak lanjut ini diharapkan dapat memberikan meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan, serta meminimalkan hambatan pada triwulan berjalan dan selanjutnya.

Triwulan Sebelumnya (TW I)				Triwulan II		
No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut	Bukti Tindak Lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
1.	Terbatasnya dasar hukum pelaksanaan kegiatan sehubungan dengan baru	Melakukan percepatan penyusunan dan penetapan kebijakan,		1.	Terjadi pergeseran anggaran RBB.006 – Rumah Swadaya	Melakukan penyesuaian segera terhadap dokumen perencanaan dan administrasi

	terbentuknya Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.	pedoman teknis, serta produk hukum pendukung sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi.			Perumahan Perdesaan dari balai/satker ke satker pusat dan kemudian kembali ke balai/satker.	pelaksanaan kegiatan sesuai dengan alokasi anggaran terbaru hasil revisi DIPA, agar tahapan kegiatan dapat segera dilanjutkan.
2.	Struktur organisasi dan pembagian tugas unit kerja belum sepenuhnya terbentuk dan terdistribusi secara efektif.	Melakukan penyempurnaan struktur organisasi serta penegasan pembagian tugas dan fungsi unit kerja untuk meningkatkan kejelasan peran dan tanggung jawab.		2.	Belum selesainya proses penyusunan pembagian anggaran antara satker pusat, balai, dan satker.	
3.	Koordinasi antarunit kerja belum berjalan optimal pada tahap awal pelaksanaan kegiatan.	Memperkuat mekanisme koordinasi internal melalui forum koordinasi rutin dan penyesuaian alur kerja guna mendukung percepatan pencapaian kinerja.				

